

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Ifatul Febriyani¹ M. Yahd² Ratna Wijayanti Daniar Paramita³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyagama Lumajang

ifafebriyani72@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di DPUTR Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan berbagai bidang antara lain : 1) bidang bina marga mengenai jalan dan jembatan, 2) bidang sumber daya air mengenai pengairan, 3) bidang tata ruang mengenai IMB (ijin mendirikan bangunan), 4) bidang cipta karya yang khusus menangani tentang drainase perkotaan dan air limbah juga permukiman, 5) bidang teknis dan kotsuksi mengenai BKK, dan 5) bagian sekretariat yang terdiri dari 2 bagian yaitu bagian umum dan kepegawaian yang menangani tentang kebutuhan alat tulis kantor dll yang berhubungan dengan kebutuhan dan kenyamanan dinas dan menangani tentang para pegawai, sedangkan bagian keuangan khusus mengelola dan melaporkan laporan keuangannya dari berbagai bidang tersebut. Obyek penelitian ini adalah laporan keuangan di DPUTR Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (PP nomor 71 tahun 2010) dengan kondisi real yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan pada Laporan Keuangan di DPUTR Kabupaten Lumajang yaitu masih menggunakan *basis kas menuju akrual*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dilaporkan disusun dengan menggunakan dasar *basis kas menuju akrual*, yang laporan keuangannya masih belum sepenuhnya ada komponen yang ada di PP nomor 71 tahun 2010.

Kata Kunci : standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan.

Abstrak

This research was conducted at DPUTR of Lumajang Regency which is one of government that functioned to carry out activities of various fields, among others: 1) the field of clan about road and bridge, 2) water resources field about irrigation, 3) space for IMB (building permit); 4) the field of work creation that deals specifically with urban drainage and wastewater also settlements; 5) technical and construction areas concerning BKK; and 5) secretariat division consisting of 2 parts; general and personnel sections which deals with office stationery needs etc. relating to the needs and convenience of the office and handles staff, while the special financial department manages and reports its financial reports from those fields. The object of this research is financial report at DPUTR of Lumajang Regency. This study aims to analyze the conformity of financial statements based on government accounting standards (PP number 71 of 2010) with real conditions that exist in the Public Works Department and Spatial Lumajang. The research method used is qualitative research,

the type of data used is secondary data. The method used in the Financial Statements of DPUTR of Lumajang Regency ie still using the cash basis towards accruals. The results showed that the preparation of financial statements Public Works and Spatial Planning not in accordance with Government Accounting Standards pursuant to Government Regulation No. 71 of 2010. Financial reports in the Public Works and Spatial Office of Lumajang Regency have been reported on the basis of cash basis towards accruals, whose financial statements are not yet fully available in PP number 71 of 2010 .

Keywords: *government accounting standards, financial statements.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan tujuan agar kualitas laporan keuangan semakin berkualitas dan lebih accountable. Laporan keuangan yang telah didapatkan oleh pemerintah daerah akan dipergunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan oleh golongan yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan akan suatu transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah (pemda), dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji dan juga disusun harus sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan akan suatu transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah (pemda), dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji dan juga disusun harus sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok acuan penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, serta menerapkan standar akuntansi pemerintahan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan di atas. Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang Nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya yang terbaru melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tentang penyelenggaraan

keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang amat kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, karena laporan keuangan di dinas PUTR masih menggunakan *basis kas menuju akrual*, belum sepenuhnya menggunakan *basis akrual*. Karena pentingnya laporan keuangan ini dalam menjadikan pemerinatahan yang baik (good government) maka penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah “ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang”.

METODE PENELITIAN

Menentukan metode penelitian merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh para peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penelitiannya. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Objek penelitian yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sumber data eksternal, dimana data ini bersifat sekunder atau data yang sudah diolah yang berasal dari laporan keuangan yang tercatat secara historis di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016. Jenis data yang didapatkan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016. Dalam usaha menganalisis data untuk penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.
- b. Melakukan analisis kesesuaian laporan keuangan berlandaskan standar akuntansi pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010) dengan kondisi real yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.
- c. Menyimpulkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memecahkan masalah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, peneliti akan mengubah laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu yang semula mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan metode cash basick to accrual akan menjadi accrual basic sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010. Adapun langkah-langkah dalam memecahkan masalah sebagai berikut

Tabel 1

Perbandingan LRA di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
dengan Penerapan Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2018

Uraian	Transaksi	PP Nomor 71 Tahun 2010	Kondisi real Dinas PUTR	Sesuai/ Tidak Sesuai
<i>Pendapatan</i>	<p>Retribusi Daerah</p> <p>A. Retribusi Jasa Usaha:</p> <p>1) Sewa tanah pengairan</p> <p>2) Sewa alat berat / walls</p> <p>3) Sewa laboratorium</p> <p>Retribusi Perijinan Tertentu</p> <p>Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan</p> <p>B. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan</p> <p>Hasil penjualan drum aspal</p> <p>Pendapatan Sewa</p> <p>Pendapatan sewa bangunan</p> <p>Lain-lain PAD yang sah</p> <p>PAD terealisasi dari hasil penjualan drum aspal dan Pendapatan sewa bangunan</p>	<p>-Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum DPUTR</p> <p>-Pencatatan pendapatan dilaksanakan berlandaskan azaz bruto</p> <p>- Pengembalian/koreksi yang sifatnya tidak bisa diulang dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada saat periode yang sama.</p> <p>- Pengembalian / koreksi yang sifatnya tidak dapat diulang disajikan di pembukuan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih.</p>	<p>-Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum DPUTR</p> <p>-Pencatatan pendapatan dilaksanakan berlandaskan azaz bruto</p> <p>- Pengembalian/ koreksi ditulis sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.</p> <p>- Pengembalian/ koreksi atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar.</p>	<i>Tidak Sesuai</i>
	<p>1)Belanja Operasi</p> <p>- Belanja pegawai (pegawai tidak</p>	<p>-Belanja diakui pada saat dikeluarkan di rekening kas umum DPUTR</p>	<p>-Belanja diakui pada saat pengeluaran dalam rekening kas</p>	

<i>Belanja</i>	<p>langsung dan langsung)</p> <p>-Belanja Barang dan jasa</p> <p>2) Belanja Modal</p> <p>-Belanja modal peralatan & mesin</p> <p>-Belanja modal jalan, Irigasi & Jaringan</p> <p>-Belanja modal gedung dan bangunan</p> <p>-Belanja modal aset lainnya</p>	<p>-Koreksi atas pengeluaran belanja (penerima kembali belanja) yang terjadi pada saat periode pengeluaran belanja disajikan di pembukuan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan dalam pos Pendapatan lain-lain.</p>	<p>umum DPUTR</p> <p>-Koreksi atas pengeluaran belanja (penerima kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja disajikan di pembukuan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya ditulis dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p>	<i>Tidak Sesuai</i>
----------------	--	---	---	---------------------

Tabel 2
Perbandingan Neraca di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
dengan Penerapan Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010

Uraian	Transaksi	PP No. 71 tahun 2010	Kondisi <i>Real</i> di Dinas PUTR	Sesuai/ Tidak Sesuai
Aset Lancar	Kas dibendahara Pengeluaran	Sisa kas sudah disetor kembali Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran	Sisa kas sudah disetor kembali Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran	sesuai
	Kas di Bendahara Penerimaan	Posisi keuangan nihil semua penerimaan / pendapatan sudah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima	Posisi keuangan nihil semua penerimaan / pendapatan sudah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima	Sesuai
	Piutang	Ditulis sebesar nilai nominal	Ditulis sebesar nilai nominal yang dapat ditagih	Sesuai
	Persediaan	-Ditulis sebesar nilai nominal yang dapat ditagih. -Persediaan yang berasal dari pembelian ditulis sebesar biaya perolehannya. -Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri ditulis sebesar biaya standar. -Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan ditulis dengan nilai wajar.	-Ditulis sebesar nilai nominal yang dapat ditagih. -Persediaan yang berasal dari pembelian ditulis sebesar harga perolehannya berlandaskan harga pembelian terakhir (FIFO) -Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri ditulis sebesar biaya standar. -Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan ditulis dengan nilai wajar	sesuai
	Tanah	Diakui sebesar biaya perolehan.	Diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian.	Sesuai

Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	-Alat-alat besar -Alat-alat angkutan -Alat-alat bengkel dan alat ukur -Alat pertanian -Alat kantor dan rumah tangga -Alat studio dan komunikasi -Alat laboratorium	Alat-alat besar -Alat-alat angkutan -Alat-alat bengkel dan alat ukur -Alat pertanian -Alat kantor dan rumah tangga -Alat studio dan komunikasi -Alat laboratorium	Sesuai
	Gedung dan Bangunan	-Bangunan Gedung -Monumen	-Bangunan Gedung -Monumen	Sesuai
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-Jalan dan Jembatan -Bangunan air (irigasi) -Instalasi -Jaringan	-Jalan dan Jembatan -Bangunan air (irigasi) -Instalasi -Jaringan	Sesuai
Ekuitas Dana	Ekuitas Dana Lancar	Tidak ada pembagian ekuitas dana. Hanya ekuitas.	Selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.	Tidak sesuai
	Ekuitas dana investasi		Kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan jumlah hutang jangka panjang.	Tidak sesuai
	Ekuitas dana cadangan		Kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan.	Tidak sesuai

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas PUTR disajikan dan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD DPUTR Kabupaten Lumajang selama tahun 2016, terutama dipergunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan ; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan keuangan pada DPUTR Kabupaten Lumajang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berlandaskan PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual, tetapi telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual, sehingga laporan yang disajikan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Berlandaskan SAP pada PP nomor 71 Tahun 2010 DPUTR Kabupaten Lumajang akan menyampaikan 6 Laporan Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca

- c. Laporan operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Catatan atas Laporan Keuangan

Bagi SKPD DPUTR tidak menyampaikan laporan arus kas karena yang menangani Laporan arus kas seluruh dinas hanya Bendahara Umum Daerah yang ada di Pemerintah Daerah yaitu Badan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKD).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mengakui laporan keuangannya menggunakan metode *cash basic* sehingga belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan dasar *cash basic* tidak menunjukkan Laporan Arus Kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Diaz, Agnes. 2016. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT*. (hlm. 1-17). Surabaya.
- D.S. Ranuba, Erlita.dkk. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1:388-397.
- Jurusan Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang. 2017, *Buku Pedoman Skripsi* . STIE Widya Gama : Lumajang.
- Juwita, Rukmi. 2014. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. POLITEKNIK POS INDONESIA. Bandung.
- Khadijah, Siti. 2017. *Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang*. STIE WIDYAGAMA: Lumajang.
- Kema, Ihwan, 2013. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bitung*. UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Manado.
- Kusuma Setiawati, Ririz. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. UNIVERSITAS JEMBER. Jember.
- Lamonisi, Sony. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon”. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 1: 223-230.
- Langelo, Frisca dkk. 2015. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung”. *Jurnal EMBA*, Vol.3, No.1:1-8.

Nugraheni, Purwaniati dkk. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. UNIVERSITAS GUNADARMA.

Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN. Makassar.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. *Tentang Good Government*. Jakarta: Komite Pendidikan dan Pelatihan Jabatan.